

**LAPORAN PENELITIAN
MANDIRI**

**ROADMAP PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
(POSYANTEK) DI KOTA SURAKARTA**



TIM PENELITIAN

Widyawati S.Sos, M.Si (Ketua)
(NIDN. 15611451)

Drs. Budiyoño, M.Si (Anggota)
(NIDN. 0702056401)

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA
2018**

**LAPORAN PENELITIAN
MANDIRI**

**ROADMAP PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
(POSYANTEK) DI KOTA SURAKARTA**



TIM PENELITIAN

Widyawati S.Sos, M.Si (Ketua)
(NIDN. 15611451)

Drs. Budiyono, M.Si (Anggota)
(NIDN. 0702056401)

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA
2018**

YAYASAN PENDIDIKAN
CENDERAH QUTUB
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
LEMBAGA PENELITIAN
HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Roadmap Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi
di Kota Surakarta
2. Ketua Peneliti : Widyawati S.Sos., M.Si
a. Nama lengkap dengan gelar : --/--/15.01.1.451
b. Pangkat/Gol/NPP : Kaprodi D-3 Kesekretariatan
c. Jabatan Fungsional/Struktural : Ilmu Administrasi
d. Fakultas : 082233410475
e. Alamat Rumah/HP : rendsata@gmail.com
f. E-mail : Satu (1) orang
3. Jumlah Anggota Peneliti : Drs. Budiyo, M.Si
a. Nama lengkap dengan gelar : Lektor/III-d/90.01.1.059
b. Pangkat/Gol/NIP : Penata Tk. I/Wakil Dekan I
c. Jabatan Fungsional / Struktural : Kota Surakarta
4. Lokasi Penelitian : 7 April sampai 15 Juni 2018
5. Jangka Waktu Penelitian : Rp. 5.000.000,-
6. Biaya Penelitian

Surabaya, 15 Juni 2018

Ketua Peneliti

Mengetahui
Dekan Fakultas

Dr. Amirul Mustofa, M.Si
NPP : 91.01.1.085



Widyawati SSos, M.Si
NPP: 15.01.1.451

(Signature)

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Dr. Soetomo



Dr. Sri Utami Ady, SE, MM
NPP: 94.01.1.170



**YAYASAN PENDIDIKAN
CENDEKIA UTAMA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Semolowaru 84 Surabaya, 60118 Telp. (031) 5925970, 5924452, Fax. (031) 5938935
website: <http://unitomo.ac.id> Email : lemlit@unitomo.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Widyawati. S.Sos., M.Si
NIDN : 0708117104
Pangkat / Golongan : -
Jabatan : KetuaPeneliti

Nama : Drs.Budiyono. M.Si
NIDN : 0702056401
Pangkat / Golongan : Lektor / IIIId
Jabatan : AnggotaPeneliti

Dengan ini menyatakan bahwa laporan hasil penelitian saya dengan judul :

**ROADMAP PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) DI
KOTA SURAKARTA.**

Yang diusulkan dalam Penelitian Mandiri Universitas Dr.Soetomo bersifat original

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya berlaku.

Surabaya, 18 Juli 2018

Yang menyatakan,

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian,



Dr. Sri UtamiAdy, SE., MM
NPP. 94.01.1.170



Widyawati, S.Sos, M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan perkenan-Nya-lah laporan akhir buku Roadmap Pengembangan Posyantek di Kota Surakarta ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penyusunan laporan hasil penelitian ini. Kami juga memohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan laporan ini

Semoga buku ini dapat menjadi masukan dan inspirasi bagi perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan di Kota Surakarta pada masa-masa yang akan datang.

Surakarta, 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup	3
 BAB 2 PENDEKATAN TEORITIS	
2.1. Konsep Kebijakan Publik	4
2.2. Konsep Kreativitas	16
2.3. Konsep Inovasi	18
2.4. Landasan Yuridis	21
 BAB 3 KERANGKA KERJA	
3.1. Metode	25
3.2. Tahap Kegiatan	25
 BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH	
4.1. Kondisi Geografis Daerah, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Dan Topografis	28
4.2. Gambaran Umum Demografis	30
4.3. Kondisi Ekonomi	35
4.4. Pertumbuhan Ekonomi	37
 BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN KETERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN POSYANTEK	
5.1. Arah Kebijakan	39
5.1.1. Visi Dan Misi	40
5.1.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah	42
 BAB 6 KONDISI EKSISTING DAN ARAH PENGEMBANGAN	
6.1. Kondisi Eksisting	45
6.2. Arah dan Strategi Pengembangan	51
6.2.1. Pemihakan Dan Pemberdayaan Masyarakat;	51
6.2.2. Pemantapan Otonomi Dan Pendelegasian Wewenang Dalam Pengelolaan Pembangunan Yang Mengembangkan Peran Serta Masyarakat	55
6.2.3. Penajaman Arah Perubahan Struktur Sosial Ekonomi, Budaya Dan Politik Yang Bersumber Pada Partisipasi Masyarakat.	57
 BAB 8 INDIKASI KEGIATAN, SASARAN AKHIR DAN RENCANA AKSI.....	
62	

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1 Tipe-Tipe Inovasi Menurut Martin Radenakers	18
Tabel 2 Luas Wilayah Berdasar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surakarta	29
Tabel 3 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta	31
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Surakarta	32
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta	33
Tabel 6 Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2017	34
Tabel 7 Jumlah Penduduk Tujuh Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Surakarta, Tahun 2017	34
Tabel 8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)	35
Tabel 9 Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan	42

Daftar Gambar

Gambar 1 Model Rasional	8
Gambar 2 Model Elit Massa	11
Gambar 3 Model Sistem Politik	13
Gambar 4 Jumlah Penduduk Kota Surakarta	33
Gambar 5 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Surakarta 2016-2017	36



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses terencana guna menciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dengan cepat, serta dapat memberikan berbagai macam perubahan kemajuan dalam segala bidang aspek bagi masyarakat (Priatama, 2013). Riyadi dalam (Mardikanto & Soebiato, 2013), juga mendefinisikan pembangunan yaitu merupakan usaha atau proses perubahan, untuk tercapainya suatu tingkat kesejahteraan dan mutu hidup kelompok masyarakat atau individu didalamnya yang berkeinginan serta melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud yaitu pembangunan secara menyeluruh baik dari segi sosial, ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan.

Pembangunan tidak hanya membantu memenuhi sarana dalam bentuk nyata seperti bangunan, jembatan, jalan ataupun bantuan sesaat yang diberikan pada masyarakat. Pembangunan hendaknya juga memperhatikan kualitas sumber daya manusianya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menjadi mandiri dengan keterampilan yang dimiliki, secara tidak langsung akan membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan (Anwas, 2014). Maka faktor utama dari kemiskinan juga terletak pada kualitas SDM suatu daerah, yang mana menjadi fokus perhatian penelitian ini. Perbaikan kualitas masyarakat dapat dilakukan

dengan cara pemberdayaan pada masyarakat, dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan agar mereka dapat mengembangkan diri.

Pemberdayaan merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki. Selain itu pemberdayaan juga merupakan suatu upaya mendorong masyarakat untuk mampu menjadi sosok utama dalam memanfaatkan lingkungannya guna mencapai suatu keberlanjutan untuk jangka panjang (Priatama, 2013). Seperti yang diungkapkan Santoso (2016) bahwa, pemberdayaan dengan kualitas masyarakatnya yang mandiri bisa menjadi sumbangan dalam kemajuan pembangunan nasional.

Salah satu program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam bentuk Posyantek Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi tentang TTG. Lembaga ini memanfaatkan teknologi buatan yang dapat membantu kegiatan usaha masyarakat di kecamatan, dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakatnya. Pentingnya penyebaran informasi menjadikan komunikasi sebagai salah satu aspek tercapainya keberhasilan pembangunan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat (Indardi, 2016). Agar program pemberdayaan ini berjalan secara komprehensif perlu adanya suatu peta jalan (road map) program Posyantek.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta adalah untuk memberikan arahan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi sebagai bagian program pemberdayaan masyarakat

Tujuan disusunnya Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta adalah:

1. Memberikan arahan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi;
2. Sinkronisasi dengan program pemberdayaan lainnya sehingga dapat berjalan komprehensif

1.3. Ruang Lingkup

Gambaran Umum Lingkup kegiatan pekerjaan ini meliputi :

1. Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan tugas konsultan yaitu melakukan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berbasiskan metode penelitian yang berkaitan dalam rangka membantu Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta di Kota Surakarta
2. Hasil kegiatan yaitu tersusunnya Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta di Kota Surakarta setidaknya menghasilkan Dokumen.



BAB 2 PENDEKATAN TEORITIS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan konseptual berupa teori mengenai konsep kebijakan publik, konsep kreativitas, dan konsep inovasi

2.1. Konsep Kebijakan Publik

Dalam Suwitri (2008) dijelaskan bahwa terdapat beberapa teori kebijakan publik menurut para ahli administrasi publik yang dapat dijelaskan sebagai beberapa ide sebagai berikut:

1. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah

Thomas R. Dye mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil pilihan tindakan untuk mencapai tujuan negara. Tindakan untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena tindakan tersebut memiliki besar dampak yang sama pada publik dan negara dibandingkan dengan pilihan tindakan lainnya. Dalam definisi ini, pemerintah memiliki kekuatan dalam decision making dan mempunyai wewenang dalam memutuskan sesuatu secara otoriter, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi untuk mengatasi persoalan publik.

Teori ini juga didukung oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang

disebutkan dan dilakukan oleh pemerintah baik itu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam policy statement seperti pidato dan janji politik yang diungkapkan oleh pejabat politik dan pejabat pemerintahan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan program-program. James E. Anderson juga mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah, baik itu badan-badan maupun pejabatnya.

2. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah

Teori ini didukung oleh Harold D. Laswell, Abraham Kaplan, dan David Easton. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Easton berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh anggota masyarakat secara paksa dan legal. Definisi menurut Easton ini dikategorikan sebagai suatu intervensi oleh pemerintah dalam penyelesaian masalah publik melalui tindakan kepada masyarakat. Tindakan tersebut merupakan proses manajemen dan bagian dari tahapan kerja pejabat publik.

3. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan

James E. Anderson, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan definisi kebijakan publik yang mendukung teori ini. Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, sedangkan menurut

Edwards III dan Sharkansky, kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan

Terdapat 2 (dua) model dalam mempelajari kebijakan publik, yaitu:

1. Model menurut hasil dan dampak, terdapat beberapa model:

- Model Rasional

Model rasional adalah model di mana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif dicari yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan. Teori-teori rasionalis berakar pada penerapan rasionalisme dan positifisme, bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara obyektif (tidak memihak) suatu pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia.

- Model Inkremental;

Model incremental menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan publik adalah sebagai suatu proses politis yang ditandai dengan tawar menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Keputusan yang akhirnya dibuat lebih mencerminkan pada apa yang tampak secara politis daripada yang diinginkan. Model incremental memandang bahwa pembuatan keputusan bagi pemecahan masalah untuk mencapai tujuan, dipilih melalui trial and error dari pada melalui evaluasi menyeluruh. Kelemahan model incremental adalah hanya dapat diambil ketika masalah yang dihadapi pembuat kebijakan publik merupakan masalah dan tidak dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah krisis.

- Model Mixed-Scanning;

Model campuran antara model rasional dan incremental untuk menjembatani kelemahan dari kedua model tersebut dengan menggabungkan elemen-elemen dari keduanya. Membuat keputusan yang sangat rasional dengan menghitung secara matematis dari setiap alternatif menjadi sesuatu yang tidak efisien dan irrasional, sedangkan incremental yang cenderung mempertahankan status-quo cenderung pula mengabaikan kebutuhan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Penggabungan model rasional dan incremental diperlihatkan Etzioni melalui dua (2) jenis keputusan yang dibuatnya, yaitu:

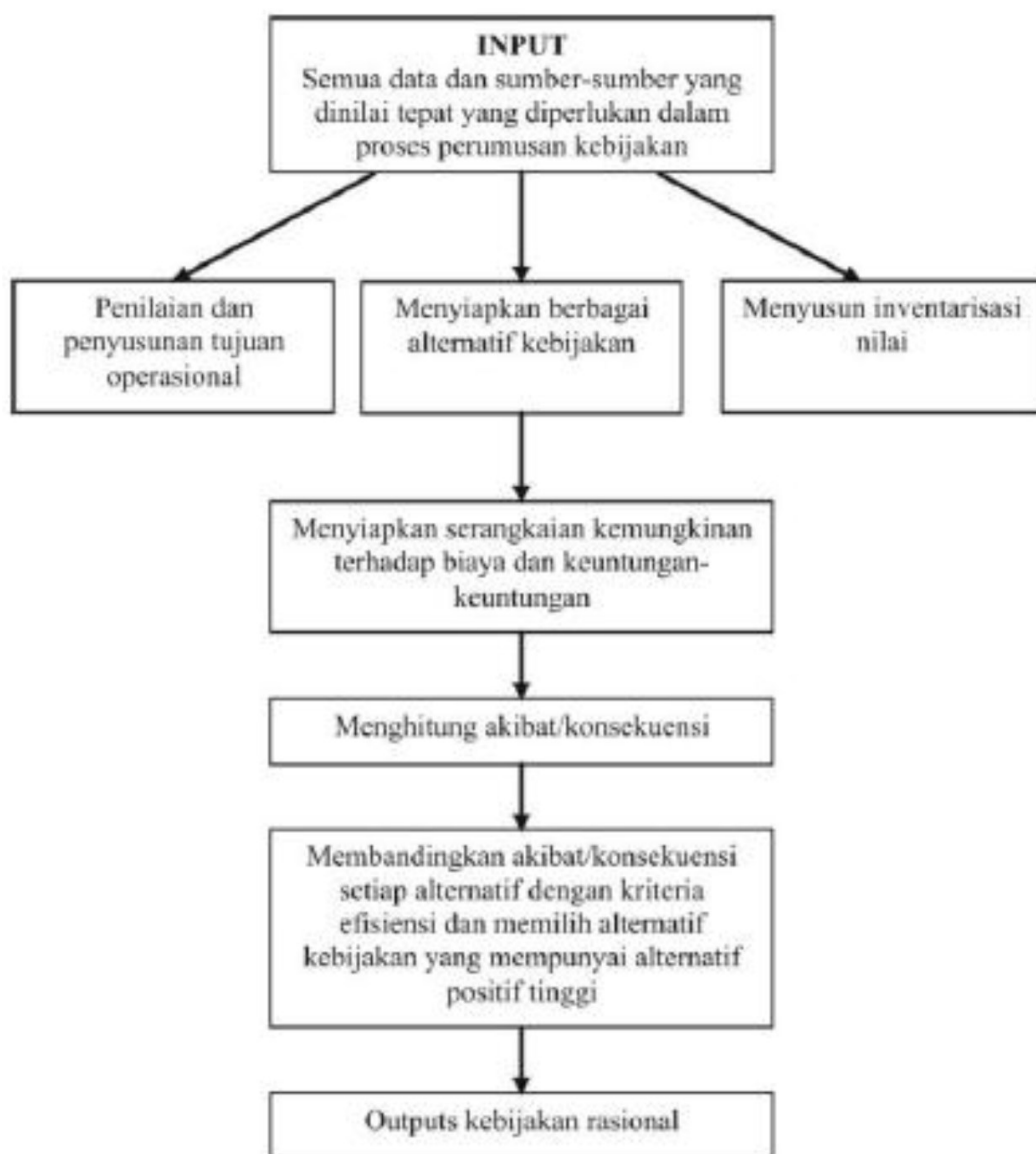
- ✓ Keputusan fundamental atau contextuating decisions
- ✓ yaitu keputusan-keputusan yang disusun dari seleksi menyeluruh terhadap alternatif utama yang diambil pembuat kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan.
- ✓ Keputusan incremental atau bit decisions
- ✓ Yaitu keputusan-keputusan yang dibuat secara incremental atau perubahan sesedikit mungkin dari keputusan-keputusan fundamental yang telah dibuat sebelumnya.

- Model Garbage Can;

March dan Olsen mengusulkan apa yang disebut “model kaleng sampah” dari pembuatan keputusan yang menolak rasionalitas dan menerima irrasional. Model- model lain keputusan diambil dengan rasionalitas atau tingkat

kesengajaan, komprehensif masalah, dan hubungan yang dapat diperkirakan diantara para pelaku kebijakan. Dalam pandangan model ini, pembuatan keputusan merupakan suatu hal yang berambiguous (bersifat mendua) sangat tinggi dan berawal dari proses yang tidak dapat diperkirakan dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan.

Gambar 1 Model Rasional



Sumber: Suwitri, 2011

- Model Institusional;

Model ini merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pada pemerintahan pusat (nasional), regional, dan lokal. Kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Terdapat hubungan yang kuat sekali antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah. Suatu keputusan dari pemilihan alternatif pemecahan masalah tidak dapat menjadi kebijakan publik tanpa keputusan tersebut dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh lembaga pemerintahan.

Menurut Thomas R. Dye, alasan terjadinya hubungan yang kuat sekali antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah, karena lembaga-lembaga pemerintahan tersebut mempunyai tiga (3) kewenangan yang tidak dimiliki lembaga-lembaga lain di luar lembaga pemerintahan, yaitu:

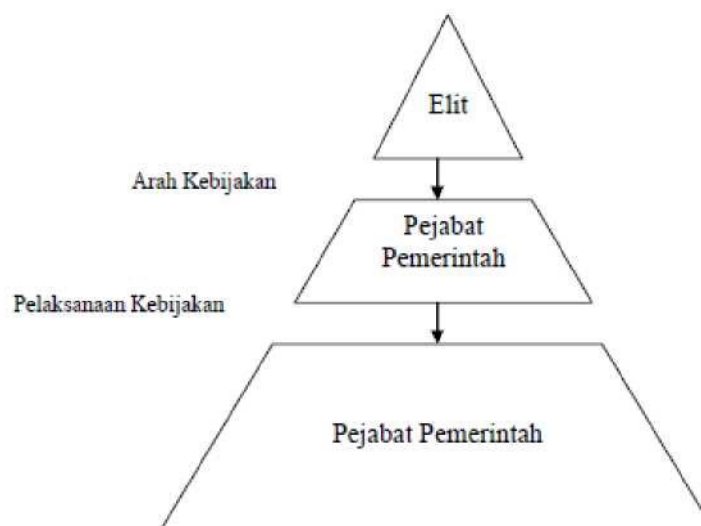
- Lembaga pemerintah berwenang memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap kebijakan publik, ini berarti kebijakan publik merupakan kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati/dilaksanakan oleh semua warga negara.
- Lembaga pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal kepada kebijakan publik, artinya kebijakan publik dapat disebarluaskan dan berlaku pada seluruh warga negara atau kelompok sasaran kebijakan publik tersebut.

- Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan publik pada anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada mereka yang tidak menaatinya.
- Model Elit-massa;
 Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk ..piramida" dimana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik (pemerintah) seharusnya menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan elit dalam setiap kebijakan publik yang diambilnya. Akan tetapi dalam model ini mereka bukan sebagai "abdi rakyat" ("servant of the people") tetapi lebih sebagai kepanjangan tangan dari „elit" yaitu „kelompok-kelompok kecil yang telah mapan" (The Establishment). Hal ini disebabkan kebijakan publik ditentukan semata-mata oleh kelompok elit, sehingga aktor pembuat kebijakan publik (pemerintah) hanyalah sekedar pelaksana-pelaksana dari kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh elit. Kelompok elit digambarkan dalam model ini sebagai mampu bertindak/berbuat untuk kepentingan mereka sendiri dalam suatu kondisi masyarakat yang bersikap apatis, kerancuan informasi, sehingga masyarakat menjadi pasif. Kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Kebijakan publik merupakan perwujudan

keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai golongan elit yang berkuasa.

Kebijakan publik seharusnya menggambarkan kepentingan/tuntutan rakyat, tetapi dalam model ini, rakyat bersifat apatis, dan buta terhadap informasi akibat tekanan dari elit, sehingga kelompok elit mampu membentuk dan mempengaruhi massa melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkannya. Elitisme menurut Thomas R. Dye mempunyai arti bahwa kebijakan publik tidak begitu banyak mencerminkan keinginan rakyat tetapi keinginan elit.

Gambar 2 Model Elit Massa



Sumber: Suwitri, 2011

- Model Kelompok;

David B. Truman menyatakan bahwa kenyataan politik merupakan interaksi diantara kelompok-kelompok kepentingan. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal kedalam kelompok kepentingan (interest group) yang dapat mengajukan dan

memaksakan kepentingan- kepentingannya kepada pemerintah. Karena itu, masyarakat terdiri dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah "a shared attitude group that makes certain claims upon other groups in the society" (suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain di dalam masyarakat). Dan kelompok kepentingan itu akan mempunyai arti politis apabila mengajukan tuntutan dari kepentingan mereka terhadap lembaga pemerintahan). Kenyataan politik merupakan perjuangan diantara kelompok-kelompok kepentingan agar kepentingan kelompok mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik dan kepentingan kelompok terakses dalam kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah.

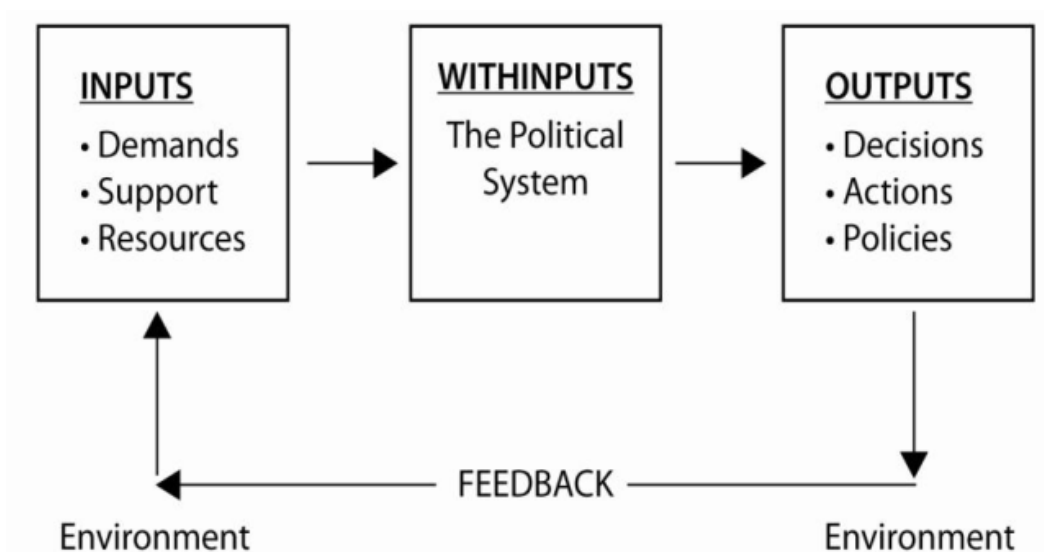
- Model Sistem Politik.

Model ini didasarkan pada konsep-konsep system yang terdiri inputs, withinputs, outputs, dan feedback dan environment yaitu kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Kebijakan publik merupakan hasil (output) dari sistem politik.

Irfan Islamy selanjutnya menjelaskan "sistem politik" sebagai sejumlah lembaga- lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (support) dan sumber-sumber (resources) yang semuanya ini adalah masukan-masukan (inputs) dan selanjutnya diubah menjadi keputusan-keputusan atau kebijak publik yang otoritatif bagi seluruh anggota

masyarakat (outputs). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs. Inputs: demands / tuntutan, support / dukungan, resources/sumber. Tuntutan-tuntutan, dukungan dan sumber selanjutnya dikonversikan (diproses) di dalam formulasi kebijakan publik sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan. aktor internal birokrasi pemerintah dan aktor-aktor eksternal birokrasi pemerintah. berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah inputs menjadi outputs, yang sering disebut dengan nama withininputs, conversion process dan the black box. Output kebijakan publik berupa undang- undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dari kegiatan politik, sebagai tindakan yang pemerintah ingin lakukan atau tidak ingin melakukan sesuatu yang secara otoritatif akan dialokasikan kepada seluruh anggota masyarakat. Dampak negatif perlu dievaluasi agar menjadi feedback dan diolah menjadi input bagi penyempurnaan kebijakan publik selanjutnya.

Gambar 3 Model Sistem Politik



Sumber: Suwitri, 2011

- Model proses atau stagist

Model ini mengusulkan alternatif kebijakan, menyeleksi, menilai dan memilih alternatif kebijakan dalam pembuatan keputusan kebijakan publik dengan memfokuskan pada elemen-elemen irrasional sikap para pembuat kebijakan publik, dengan memperhatikan irrasional kepentingan publik dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

Penyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha merupakan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut good governance. Pelaksanaan re-inventing government harus diikuti dengan pola pemerintahan yang baik atau prinsip good governance yang menurut UNDP (dalam Sedarmayanti) meliputi:

- Partisipasi (Participation)

Setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

- Aturan Hukum (Rule of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.

- Transparansi (Transparency)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

- Daya Tanggap (Responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)

- Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- Berkeadilan (Equity)

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

- Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan

melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

- Akuntabilitas (Accountability)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders)

- Visi Strategis (Strategic Vision)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

- Saling Keterbukaan (Interrelated)

Keseluruhan ciri good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (mutually reinforcing) dan tidak bias berdiri sendiri.

2.2. Konsep Kreativitas

Bryd dan Bryman (2003) menyatakan bahwa terdapat dimensi yang mendasari keberhasilan, yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru yang terdiri dari tiga aspek, yaitu keahlian, kemampuan berpikir fleksibel dan imajinatif. Dalam proses kreativitas, individu

mempunyai ide-ide baru berdasarkan proses berpikir imajinatif dan didukung oleh motivasi internal yang tinggi. Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional (2008), kreativitas adalah kemampuan individu untuk mempergunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh dari interaksi dengan ide atau gagasan, orang lain dan lingkungan untuk membuat

Kreativitas adalah potensi yang dimiliki setiap orang, sehingga kreativitas sebenarnya dapat diasah dan dimanfaatkan. Dalam proses mengasah kreativitas atau melatih pola pikir kreatif, menurut Edward de Bono (Endang Supardi, 2004) harus melalui 4 (empat) proses perkembangan, yaitu:

- Latar Belakang atau Akumulasi Pengetahuan
- Proses Inkubasi
- Melahirkan Ide
- Evaluasi dan Implementasi

Menurut Amabile (2012), kreativitas adalah menghasilkan ide-ide baru yang berguna dalam bidang apapun koneksi dan hasil yang baru serta bermakna. Hal ini berarti mengembangkan ide alternatif atau kemungkinan lain dengan bermacam-macam cara sehingga dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dalam interaksi individu dengan lingkungan sehingga diperoleh cara-cara baru untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna. Apabila ditarik benang merah, dapat dirinci bahwa kreativitas adalah

- Kemampuan menemukan ide baru yang original
- Kemampuan menemukan hubungan baru
- Kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang baru

- o Kemampuan membentuk kombinasi baru

2.3. Konsep Inovasi

Menurut Amabile (2012), inovasi yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan ide-ide kreatif. Selain itu pengertian inovasi adalah tindakan yang memberi sumber-daya kekuatan dan kemampuan baru untuk menciptakan kesejahteraan, dengan kata lain inovasi menciptakan sumber-daya. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi sumber-daya sampai orang menemukan manfaat dari sesuatu yang terdapat di alam, sehingga memberinya nilai ekonomis (Drucker, 1986)

Pada tahun 1949 Schumpeter (dalam Hermana, 2008) menyebutkan bahwa inovasi terdiri dari lima unsur yaitu: (1) memperkenalkan produk baru atau perubahan kualitatif pada produk yang sudah ada, (2) memperkenalkan proses baru ke industri, (3) membuka pasar baru, (4) Mengembangkan sumber pasokan baru pada bahan baku atau masukan lainnya, dan (5) perubahan pada organisasi industri.

Sedangkan Martin Radenakers (dalam Hermana, 2008) membagi inovasi ke dalam beberapa tipe yang mempunyai karakteristik masing-masing sebagai berikut pada

Tabel

Tabel 1 Tipe-Tipe Inovasi Menurut Martin Radenakers

No	Tipe Inovasi	Karakteristik
1	Inovasi Produk	Produk, jasa, atau kombinasi keduanya yang baru
2	Inovasi Proses	Metode baru dalam menjalankan kegiatan bernilai tambah
3	Inovasi	Metode baru dalam mengelola, mengkoordinasi, dan

4	Inovasi Bisnis	Kombinasi produk, proses, dan sistem organisasional yang
---	----------------	--

Sumber: Hermana, 2008

Inovasi adalah terapan yang bersifat konseptual dan perseptual, sehingga inovator harus keluar, melihat, bertanya dan mendengarkan fenomena yang ada disekitarnya. Inovator yang sukses menggunakan kedua sisi otaknya. Mereka mempelajari peluang apa yang bisa dikembangkan guna dijadikan inovasi. Mereka melihat dan mengamati setiap potensial kostumer apa harapan mereka, nilai yang mereka butuhkan dan kebutuhan mereka. Agar berjalan efektif, inovasi harus mudah dan dilakukan dengan fokus. Inovasi harus pada satu bidang, jika tidak akan membingungkan orang. Inovasi harus dimulai dari yang kecil, ini bukan merupakan perubahan yang besar. Perubahan kecil bisa membawa perubahan yang besar, sebaliknya jika perubahan dilakukan secara besar-besaran biasanya justru tidak akan efektif (Drucker, 2002). inovasi yang sistematis berarti memantau 7 (tujuh) sumber peluang inovasi. Empat sumber pertama terdapat di dalam lingkungan organisasi. Sumber itu pada dasarnya gejala, tetapi semuanya adalah indikasi yang dapat dipercaya sepenuhnya akan adanya perubahan yang telah terjadi atau dapat dibuat terjadi dengan sedikit usaha. Kelompok kedua sumber peluang inovasi terdiri dari tiga hal, menyangkut perubahan yang terjadi di luar organisasi. Berikut uraian dari ketujuh sumber peluang inovasi:

- The unexpected

Sesuatu yang tidak diduga menurut Drucker (1986) adalah sukses yang tidak diduga, kegagalan yang tidak diduga dan kejadian luar yang tidak diduga.

- The incongruity

Drucker (1986) membagi empat jenis ketidak-serasian yaitu Ketidak-serasian antara berbagai realita ekonomi dari sebuah industri, Ketidak-serasian antara realita sebuah industri dengan asumsinya, Ketidak-serasian antara upaya sebuah industri dengan nilai serta harapan pelanggannya, dan Ketidak-serasian intern dalam irama atau logika dari sebuah proses

- Process Need

kebutuhan adalah induk penemuan” (Drucker, 1986). Kebutuhan proses menyempurnakan proses yang sudah ada, mengganti mata rantai yang lemah, merancang ulang proses lama yang sudah ada atas dasar pengetahuan baru. Adakalanya ia memungkinkan terlaksananya sebuah proses dengan menyumbangkan "mata rantai yang hilang” (Drucker, 1986)

- Industry and Market Structure

Struktur industri dan pasar kadang dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama sekali, Namun, sebenarnya struktur industri dan pasar cukup rapuh, satu kesalahan kecil saja sudah bisa membuat struktur berantakan Jika terjadi sedikit peluang, maka pelaku usaha harus sigap untuk mengambil keuntungan dari perubahan struktur industri dan pasar (Drucker, 1986)

- Demographic

sumber peluang inovasi dari struktur demografik diperoleh dari:

- Kependudukan, meliputi jumlah penduduk, struktur usia, komposisi, pekerjaan, status pendidikan dan pendapatan
- Perubahan dalam persepsi, berkaitan dengan informasi baru ataupun gaya hidup
- Pengetahuan baru yang sedang berkembang di masyarakat. (Drucker, 1986)

- Change in perception

mampu melihat adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap isu-isu di sekitar, baik lokal maupun global. Hal ini akan mendatangkan peluang inovasi terhadap bisnis mereka (Drucker, 1986).

- New Knowledge

Inovasi berdasarkan pengetahuan baru sering diidentikkan sebagai inovasi yang sebenarnya. Inovator sering sekali dianggap karena ia sudah memiliki pengetahuan terhadap bidang tersebut.

Menurut Schumpeter, Syarat-syarat terjadinya inovasi:

- Harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi (innovator dan wiraswasta) di dalam masyarakat
- Harus ada lingkungan social, politik dan teknologi yang bisa merangsang semangat inovasi dan pelaksanaan ide-ide untuk berinovasi

2.4. Landasan Yuridis

Tinjauan landasan hukum pada bagian ini dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknologi termasuk teknologi tepat guna yang akan dikembangkan Pusyantek.

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK

Untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian,

pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan tanggung jawab negara. Sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK tersebut mengandung dan membentuk keterkaitan yang saling terintegrasi dan menguatkan antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2002, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Sistem nasional ini berfungsi untuk membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh.

Tinjauan Landasan Hukum Pengertian Inovasi Dalam Uu No. 18 Tahun 2002

Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 1 angka 7	Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan
Pasal 1 angka 9	Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu

Sumber: UU No. 18 Tahun 2002 yang ditabulasikan

- Pos Pelayanan Teknologi

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap TTG, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes), Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di seluruh Indonesia untuk (1) melaksanakan operasionalisasi Posyantekdes; (2) memberikan

petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Posyantekdes, serta meningkatkan dan memantapkan koordinasi keterpaduan pelaksanaannya dengan dinas/instansi terkait yang ada di daerah; (3) menetapkan pola pembinaannya; (4) mengalokasikan dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan (5) melaporkan hasil pelaksanaannya.

Terbentuknya Posyantek ini merupakan komitmen dari Pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui TTG sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara nasional dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, disebutkan bahwa “Pos Pelayanan Teknologi Tepat

Guna” (Posyantek) adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi TTG. Dengan demikian, pemanfaatan TTG secara optimal akan dapat terwujud bila terjadi alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan alih keterampilan (transfer of skill) dari sumber TTG kepada masyarakat luas selaku pengguna (user). Alih TTG dilaksanakan melalui upaya pemasyarakatan TTG, yang bertujuan untuk mendorong meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat lebih aktif dan berpikir rasional dalam mengeksplorasi sumber daya alam bagi usaha meningkatkan pendapatan. Pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan upaya yang strategis dalam rangka meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Posyantek ini masyarakat sebagai perorangan/kelompok usaha home industri mulai mendapatkan manfaat positifnya. Masyarakat mulai mengetahui keberadaan, fungsi, dan peranan Posyantek, karena dipandang membantu melayani dan mempertemukan antara penemu, pengembang, dan pemanfaat berbagai keperluan dan kebutuhan alat-alat Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai dengan yang dibutuhkan dan mampu memberikan nilai tambah bagi kegiatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.



BAB 3 KERANGKA KERJA

3.1. Metode

Metode yang digunakan dalam perumusan profil anak ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan yang berkaitan dengan Pos Pelayanan Teknologi sebagai sumber utama dan dokumen lain yang relevan sebagai sumber tambahan.

3.2. Tahap Kegiatan

A. KEGIATAN PERSIAPAN.

Persiapan awal berupa mempersiapkan data-data yang di butuhkan terkait dengan Penyusunan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta di Kota Surakarta.

Persiapan instrumen survey berupa:

- Persiapan daftar data/inventarisasi dan informasi yang diperlukan untuk Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta di Kota Surakarta .Persiapan bahan-bahan referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan analisis yang berupa: Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Permendagri, Peraturan Walikota, Peraturan Daerah Kota Surakarta yang berkaitan dengan Pelayanan Teknologi di Kota Surakarta..
- Penyusunan daftar pertanyaan

B. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA, SURVEI DAN WAWANCARA

Pengumpulan data, adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari masing-masing instansi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota untuk mendukung kegiatan Penyusunan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Surakarta..

Survei, adalah kegiatan survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika di butuhkan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta.

Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab kepada naras umber/keyinforman atau pemangku kepentingan yang membidangi dan paham terhadap kegiatan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta ..

C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA.

1. Kompilasi data. Pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
 - a. Memadukan data antara data primer dan data sekunder
 - b. Mentabulasi dan mensistemasan fakta dan informasi sesuai keperluan sehingga mudah dibaca dan dimengerti
 - c. Tersusunnya informasi/data mengenai Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta ..
2. Analisa Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta.

D. KEGIATAN PENYUSUNAN.

Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi dan survei dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya adalah tahapan Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta. Adapun keluaran atau output adalah Buku Penyusunan Road Map Pos Pelayanan Teknologi Kota Surakarta.



BAB 4

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1. Kondisi Geografis Daerah, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Dan Topografis

▪ Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kota Surakarta adalah salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara $110^{\circ}45'15''$ - $110^{\circ}45'35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}36'$ - $7^{\circ}56'$ Lintang Selatan. Kota Surakarta berada pada cekungan diantara dua gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi serta di bagian timur dan selatan dibatasi oleh sungai Bengawan Solo.

Kota Surakarta merupakan pusat perdagangan dan jasa. Hal tersebut sangat didukung dengan posisi kota yang strategis diantara jalur pusat kota Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur.

▪ Batas Administrasi Daerah

Batas administrasi wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Panjang maksimal dari utara ke selatan adalah 7,23 km dan lebar maksimal dari barat sampai ke timur adalah 11,04 km. Suhu udara rata-rata berkisar antara $25,8^{\circ}\text{C}$ sampai $28,3^{\circ}\text{C}$, dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 66% sampai dengan 84%.

▪ Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,04 km² yang terbagi menjadi beberapa wilayah administratif terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan dengan pembagian luas sebagai berikut:

Tabel 2 Luas Wilayah Berdasar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surakarta

NO.	KECAMATAN DAN KELURAHAN	LUAS WILAYAH
01.	Kecamatan Laweyan	8,638
1.	Kel. Pajang	1,553
2.	Kel. Laweyan	0,248
3.	Kel. Bumi	0,373
4.	Kel. Panularan	0,544
5.	Kel. Penumping	0,503
6.	Kel. Sriwedari	0,513
7.	Kel. Purwosari	0,843
8.	Kel. Sondakan	0,785
9.	Kel. Kerten	0,921
10.	Kel. Jajar	1,055
11.	Kel. Karangasem	1,300
02.	Kecamatan Serengan	3,194
1.	Kel. Joyotakan	0,459
2.	Kel. Danukusuman	0,508
3.	Kel. Serengan	0,640
4.	Kel. Tipe	0,640
5.	Kel. Kratonan	0,324
6.	Kel. Jayengan	0,293
7.	Kel. Kemlayan	0,330
03.	Kecamatan Pasar Kliwon	4,815
1.	Kel. Joyosuran	0,540
2.	Kel. Semanggi	1,668
3.	Kel. Pasar Kliwon	0,360
4.	Kel. Gajahan	0,339
5.	Kel. Baluwarti	0,407
6.	Kel. Kampung Baru	0,306
7.	Kel. Kedung Lumbu	0,551
8.	Kel. Sangkrah	0,452
9.	Kel. Kauman	0,192
04.	Kecamatan Jebres	12,582
1.	Kel. Kepatihan Kulon	0,175
2.	Kel. Kepatihan Wetan	0,225
3.	Kel. Sudiroprajan	0,230
4.	Kel. Gandekan	0,350
5.	Kel. Sewu	0,485
6.	Kel. Pucang Sawit	1,270

NO.	KECAMATAN DAN KELURAHAN	LUAS WILAYAH
7.	Kel. Jagalan	0,650
8.	Kel. Purwodiningratan	0,373
9.	Kel. Tegalharjo	0,325
10.	Kel. Jebres	3,170
11.	Kel. Mojosongo	5,329
05.	Kecamatan Banjarsari	14,811
1.	Kel. Kadipiro	5,088
2.	Kel. Nusukan	2,063
3.	Kel. Gilingan	1,272
4.	Kel. Setabelan	0,277
5.	Kel. Kestalan	0,208
6.	Kel. Keprabon	0,318
7.	Kel. Timuran	0,315
8.	Kel. Ketelan	0,250
9.	Kel. Punggawan	0,360
10.	Kel. Mangkubumen	0,797
11.	Kel. Manahan	1,280
12.	Kel. Sumber	1,333
13.	Kel. Banyuanyar	1,250
	5 Kecamatan, 51 Kelurahan	44,040

Sumber: Bappeda Kota Surakarta, 2016 diolah dari berbagai sumber

▪ Topografis

Kota Surakarta memiliki bentangan topografi yang relatif datar atau dataran rendah, dimana terdapat sungai besar yang melintasi, yaitu Sungai Bengawan Solo. Ketinggian wilayah antara 105 meter diatas permukaan laut sampai dengan 95 meter diatas permukaan laut (pusat kota). Selain itu, Kota Surakarta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di bagian barat, Gunung Lawu di sebelah timur serta Pegunungan Sewu di sebelah selatan.

4.2. Gambaran Umum Demografis

Secara administratif Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan dan 51 kelurahan, dengan 606 rukun warga (RW) dan 2.720 Rukun Tetangga (RT) dengan perincian

sebagai berikut:

Tabel 3 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT
1. Laweyan	11	105	457
2. Serengan	7	72	312
3. Pasar	9	100	423
4. Jebres	11	153	649
5. Banjarsari	13	176	879
Kota	51	606	2.720

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Surakarta, 2017

Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terluas, dimana luasnya mencapai 33,63% dari luas Kota Surakarta. Untuk tingkat kepadatan penduduk, dibandingkan dengan kota-kota lain, Kota Surakarta merupakan kota yang paling padat penduduknya di Jawa Tengah. Berdasarkan gambar peta dibawah ini, dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Jebres dengan kepadatan 11.464 Jiwa/km². Selanjutnya Kecamatan Laweyan dengan kepadatan 11.676 Jiwa/km². Untuk Kecamatan Banjarsari mempunyai kepadatan penduduk 12.083 jiwa/km², Kecamatan Serengan mempunyai kepadatan penduduk 16.905 Jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pasar Kliwon dengan kepadatan 17.596 Jiwa/km².



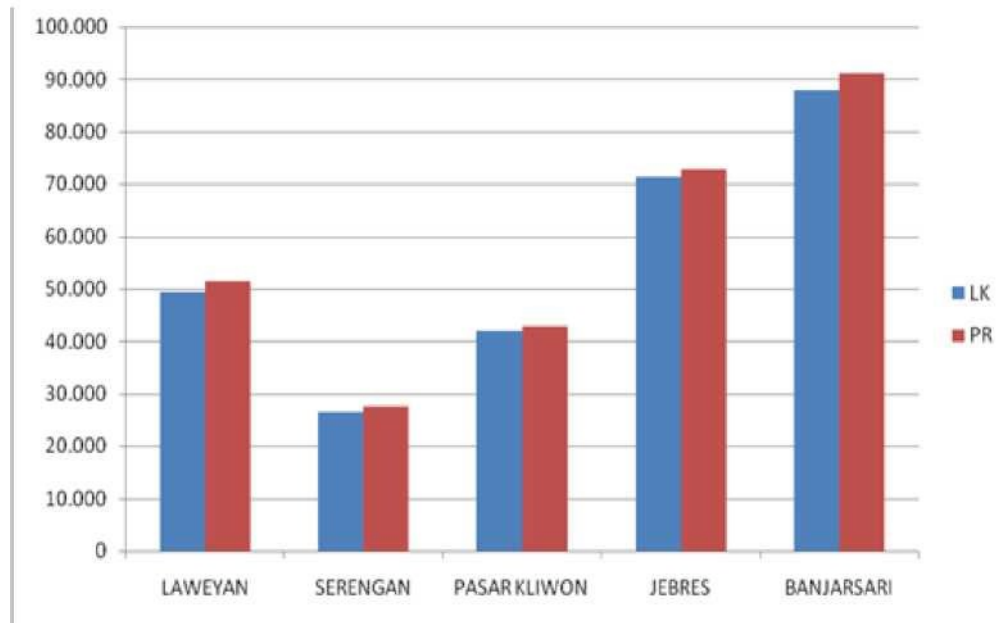
Berdasarkan data tahun 2017 jumlah penduduk Kota Surakarta secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terjadi proses penunggalan data yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Data Konsolidasi Bersih/ DKB Semester 2 Tahun 2017). Berdasarkan data SIAK 2017, jumlah penduduk Kota Surakarta tercatat sebanyak 562.801 jiwa seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Surakarta

KECAMATAN	Jumlah Penduduk		Angka Pertumbuhan Pddk	
	Tahun	Tahun	Pertambahan	LPP%
LAWEYAN	102.333	100.861	- 1.472	- 1,459
SERENGAN	54.649	53.996	- 653	- 1,209
PASAR KLIWON	86.679	84.729	- 1.950	- 2,301
JEBRES	146.209	144.241	- 1.968	- 1,364
BANJARSARI	181.006	178.974	- 2.032	- 1,135
JUMLAH	570.876	562.801	- 8.075	-1,434

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2017. Diolah

Gambar 4 Jumlah Penduduk Kota Surakarta



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2017. Diolah

Dari data di atas jumlah penduduk tahun 2017 mengalami penurunan sejumlah 8.075 jiwa atau sebesar -1,434%. Penurunan jumlah penduduk disebabkan proses penunggalan data.

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta

NO	KECAMATAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	LAWEYAN	49.379	51.482	100.861
2	SERENGAN	26.410	27.586	53.996
3	PASAR KLIWON	41.947	42.782	84.729
4	JEBRES	71.352	72.889	144.241
5	BANJARSARI	87.893	91.081	178.974
TOTAL		276.981	285.820	562.801

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Tahun 2017 Semester II

Komposisi penduduk Kota Surakarta menurut struktur usia merata dan seimbang di semua kelompok usia, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6 Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kota Surakarta Tahun 2017

NO	UMUR	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-04	19.706	18.965	38.671
2	05-09	23.162	22.212	45.374
3	10-14	23.297	22.202	45.499
4	15-19	22.216	21.772	43.988
5	20-24	20.963	20.557	41.520
6	25-29	19.788	19.689	39.477
7	30-34	21.475	21.311	42.786
8	35-39	23.662	23.864	47.526
9	40-44	20.877	21.241	42.118
10	45-49	19.547	20.792	40.339
11	50-54	17.477	19.655	37.132
12	55-59	15.196	17.039	32.235
13	60-64	12.063	13.212	25.275
14	65-69	7.819	8.819	16.638
15	70-74	4.067	5.608	9.675
16	>=75	5.666	8.882	14.548
TOTAL		276.981	285.820	562.801

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Tahun 2017. Diolah

Berdasarkan data SIAK Tahun 2017 jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas pada tingkat pendidikan, seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 7 Jumlah Penduduk Tujuh Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota

Surakarta, Tahun 2017

N	Tingkat	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum	17.485	7.0	19.252	7,4	36.737	7,26%
2	Belum Tamat	30.419	12.26	31.184	12,09	61.603	12,17%
3	Tamat SD/Sederajat	35.694	14,38	46.322	17,96	82.016	16,21%
4	SLTP / Sederajat	41.513	16.73	41.717	16,18	83.230	16,45%
5	SLTA/Sederajat	84.567	34.08	80.360	31,16	164.92	32,59%
6	Diploma I/II	1.452	0.5	1.937	0,7	3.389	0,67%
7	Akademi/Diploma III	10.529	4.2	11.863	4,6	22.392	4,42%
8	Diploma IV/Strata I	23.731	9.5	23.363	9,0	47.094	9,31%
9	Strata II	2.634	1.0	1.842	0,7	4.476	0,88%
1	Strata III	150	0.0	62	0,0	212	0,04%
Jumlah		248.174	100,0	257.902	100,0	506.07	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

4.3. Kondisi Ekonomi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan atau potensi suatu daerah adalah dengan melihat seberapa besar angka PDRB di wilayah tersebut. Karena PDRB merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu.

Tabel 8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017
(Juta Rupiah)

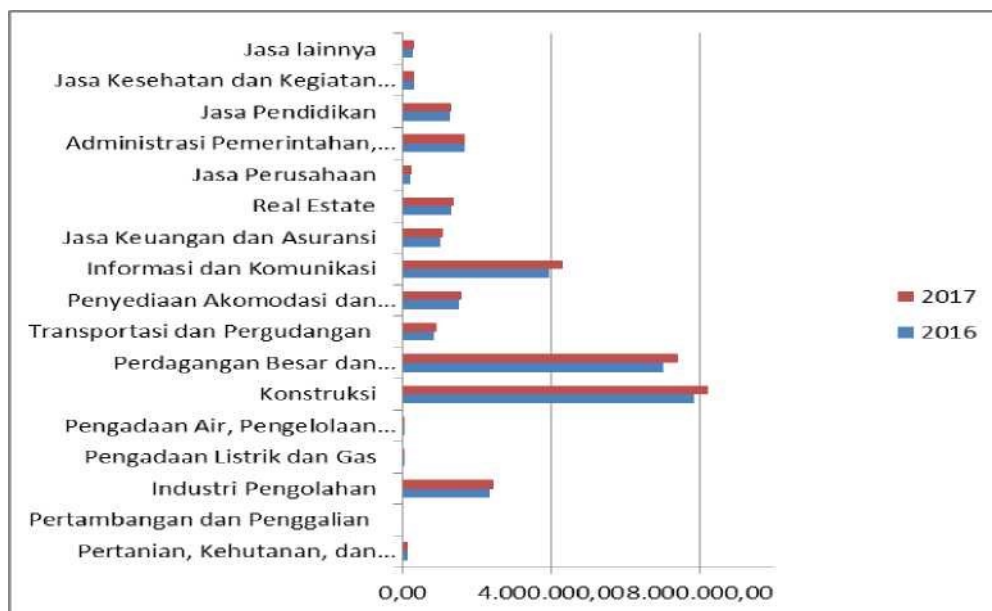
No.	Lapangan Usaha	2016	%	2017 **)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	131.448,34	0,52	136.519,99	0,50
B	Pertambangan dan Penggalian	532,82	0,00	530,74	0,00
C	Industri Pengolahan	2.347.880,69	8,55	2.446.405,47	8,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	69.156,76	0,20	72.109,52	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Umbali dan Daur	50.640,12	0,15	53.518,10	0,15
F	Konstruksi	7.865.547,96	26,97	8.255.938,75	26,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Seped;	7.029.200,29	22,45	7.415.193,59	22,43
H	Transportasi dan Pergudangan	859.855,02	2,61	908.893,25	2,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.537.527,02	5,93	1.605.308,59	5,85
J	Informasi dan Komunikasi	3.949.332,65	10,43	4.302.733,75	11,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.046.410,12	3,92	1.091.006,81	3,92
(	Real Estate	1.328.972,87	4,11	1.397.574,02	4,07
M,N	Jasa Perusahaan	224.829,61	0,81	233.751,42	0,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	1.661.471,93	5,95	1.682.112,54	5,72
P	Jasa Pendidikan	1.269.374,34	5,33	1.326.726,85	5,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	305.638,62	1,10	326.332,40	1,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	288.553,84	0,95	308.354,68	0,94
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29.966.373,01		31.563.010,46	
	Penduduk Pkrtngahan Tahun (orang)	513.210		515.165	
	PDRB Per kapita	58.390.080		61.267.769	

Sumber: BPS Kota Surakarta

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kategori konstruksi, Perdagangan, informasi dan komunikasi, serta kategori Industri Pengolahan merupakan sektor unggulan Kota Surakarta. Hal ini ditunjukkan dari besarnya angka yang menyumbang pada besarnya angka PDRB secara keseluruhan. Kontribusi kategori terbesar terhadap ekonomi Kota Surakarta yaitu konstruksi sebesar 26,97 % ditahun 2016 mengalami penurunan 26,71 % di tahun 2017 (Konstruksi). Kontribusi kategori terbesar kedua adalah Perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 22,45 % di tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu sebesar 22,43%.

Gambar 5 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Konstan 2010 Kota Surakarta 2016-2017



Sumber: BPS Kota Surakarta

4.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan turunan dari angka PDRB yang menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro dalam jangka panjang. Namun demikian pertumbuhan ekonomi bukanlah semata-mata tujuan akhir dari suatu pembangunan. Tujuan utama dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pertumbuhan ekonomi digambarkan sebagai fungsi dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan nilai ekspor- impor. Indikator ekonomi makro kota secara umum dapat dilihat dari tingkat laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan selisih nilai ekspor dan impornya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 laju inflasi di Kota Surakarta sebesar 3,10 % lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 3,71 %, dan masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,61 %. Terkendalinya harga komoditas barang dan jasa di Pasaran menekan angka inflasi selama tahun 2017.
- b. Laju pertumbuhan ekonomi kota Surakarta tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,33 %, kontribusi kategori terbesar adalah konstruksi 26,71% disusul kategori perdagangan sebesar 22,43 % dan urutan ke 3 kategori informasi dan komunikasi sebesar 11,09 %.
- c. PDRB Kota Surakarta tahun 2017 atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,3 triyun atau 8,65 %, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 37.793.266.180.000,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp.

41.062.083.530.000,-. Sedangkan PDRB atas dasar konstan tahun 2010, ada kenaikan sebesar Rp. 1.596.637.450.000,-. Atau naik sebesar 5,33 %, dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 29.966.373.010.000,- dan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 31.563.010.460.000,-.

- d. Pendapatan per kapita tahun 2017 adalah Rp. 61.267.769,48 lebih tinggi 4,93 % dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 58.390.080,09. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Kota Surakarta menjadi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.



BAB 5

ARAH KEBIJAKAN DAN KETERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN POSYANTEK

5.1. Arah Kebijakan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025. RPJPD tersebut menguraikan arah pembangunan yang akan dicapai Kota Surakarta dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang yang disusun berdasarkan visi dan misi daerah dan dijabarkan dalam tujuan, strategi, dan tahapan pembangunan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021 yang menguraikan visi dan misi jangka menengah daerah lima tahunan dengan merujuk pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta terpilih dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021.

Dalam kerangka RPJMD, kebijakan pembangunan lebih lanjut dijabarkan menjadi kebijakan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan terjemahan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan yang selanjutnya tercermin dalam penganggaran pada

APBD.

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2010 - 2015 telah habis masa berlakunya pada Tahun 2015 sedangkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021 baru ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2016 sehingga Tahun 2017 dapat dikatakan sebagai tahun atau masa transisi. Untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program- program pembangunan di Kota Surakarta, selama RPJMD yang mengakomodasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih belum ditetapkan, penyusunan program dan kegiatan Tahun 2017 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025. Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 2015, nomor 050/1854/SJ, tentang Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016 yang menyatakan bahwa bagi daerah yang RPJMD nya telah berakhir agar berpedoman pada RPJPD.

Penyusunan LKPJ Walikota Surakarta Tahun 2017 sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada pelaksanaan RKPD Kota Surakarta Tahun 2017 merupakan tahapan tahun pertama RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Surakarta Tahun 2016 serta target pembangunan tahun pertama RPJMD 2016-2021.

5.2. Visi Dan Misi

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 merupakan tahapan dan skala

prioritas pembangunan daerah tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025, yang diselenggarakan dalam masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta selama kurun waktu 2016-2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021.

Visi Kota Surakarta sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah **“TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”**, sedangkan misi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

a. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

b. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

c. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

d. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang

akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani.

e. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

5.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut:

Tabel 9 Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
WARAS	Promosi dan edukasi PHBS Menuju penguatan Upaya kesehatan preventif	Pembiasaan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan jumlah fasilitas cakupan dan jenis layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	v	v	v	v	v	
	Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Peningkatan tata kelola lingkungan sehat		v	v	v	v	
WASIS	Perluasan akses dan penguatan mutu pendidikan formal dan nonformal yang berkarakter	Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan	v	v	v	v	v	

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	unggul							
	Mengintegrasikan kurikulum Karakter unggul ke dalam Pengembangan media pendidikan	<i>Membudayakan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul</i>	v	v	v	v	v	v
	Memasyarakatkan budaya inovatif dan kreatif melalui pendidikan luar sekolah dan masyarakat berbasis nilai adat istiadat dan seni budaya	<i>Pelebagaan budaya kreatif dan inovatif masyarakat</i>	v	v	v	v	v	
	Pemberdayaan pemuda untuk mengembangkan prestasi seni dan olahraga	<i>Pengembangan kreatifitas pemuda</i>	v	v	v	v	v	
WAREG	Penguatan kemampuan produktif dan karakter mandiri pada kelompok PMKS, pengangguran dan rentan miskin	Percepatan pengentasan Masyarakat miskin dan pengangguran	v	v	v	v	v	
	Peningkatan produktivitas dan kecukupan bahan kebutuhan pokok	Penguatan ketahanan pangan	v	v	v	v	v	
	Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan sosial, ekonomi, budaya, fisik, basis data terintegrasi dan teknologi informasi	Pengembangan sistem Manajemen pembangunan partisipatif	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja pembangunan	Penguatanreformasi birokrasi	v	v	v	v	v	v
	pengintegrasian data kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan	Manajemen pembangunan berwawasan kependudukan		v	v	v	v	
	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan		v		v		v
	Penegakan hukum dan regulasi daerah dengan membuka ruang monitoring publik	Peningkatan kondusivitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kota	v	v	v	v	v	v
	Perluasan pendidikan Kesadaran hukum masyarakat	Pelebagaan budaya masyarakat tertib hukum	v	v	v	v	v	v
PAPAN	Pemerataan pembangunan Kawasan permukiman yang sehat	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	v	v	v	v	v	v

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dan berkeadilan	memenuhi Universal Access						
	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas transportasi dan lalu lintas yang tertib, lancar, nyaman, dan selamat	Peningkatan infrastruktur perhubungan	v	v		v		v
	Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah	Peningkatan tata kelola lingkungan hidup	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan kapabilitas masyarakat siaga antisipasi resiko bencana	Pengendalian kawasan rawan bencana	v	v		v		v
	Perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyarakat	Perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter Eco Cultural City berbasis partisipasi publik	v	v	v		v	
	Pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian yang berdaya saing	Peningkatan infrastruktur Pendukung perekonomian	v	v		v	v	
	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial budaya yang berkeadilan (inklusif)	Peningkatan infrastruktur sosial budaya	v	v		v	v	

Mengacu pada RPJMD 2016-2012 keterkaitan Posyantek dapat melekat pada misi Wasis

dengan arah kebijakan:

- a. Membudayakan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkarakter unggul
- b. Pelembagaanbudaya kreatif dan inovatif masyarakat
- c. Pengembangan kreatifitas pemuda



BAB 6

KONDISI EKSISTING DAN ARAH PENGEMBANGAN

6.1. Kondisi Eksisting

Pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan TTG. Pemetaan kebutuhan dilakukan untuk mengenali potensi-potensi dan masalah yang ada di daerah/desa. Pemetaan kebutuhan ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha masyarakat, sosial budaya dan potensi sumberdaya lokal. Pemetaan kebutuhan yang dimaksudkan tidak hanya berbentuk data secara manual/statistic, melainkan juga gambaran peta tematik yang menunjukkan wilayah atau daerah lengkap dengan potensi sumberdaya dan usaha yang dimiliki. Gambaran peta disini akan membantu proses identifikasi pemberian bantuan jenis TTG yang sesuai dengan kebutuhan potensi wilayah dalam masyarakat.

Bidang usaha yang dimiliki masyarakat berbagai macam bentuknya, mulai dari industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis usaha dan potensi wilayah dalam masyarakat maka dapat diidentifikasi alat TTG yang sesuai kebutuhan. Hasil analisis terhadap pemetaan kebutuhan TTG yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan baik, pengumpulan data dilakukan di berbagai daerah dengan melihat berbagai jenis usaha dan potensi sumberdaya lokal yang dirangkum dalam sebuah dokumen

berbentuk tabel. Selama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan secara manual dimana belum terdapat gambaran peta yang menunjukkan wilayah berpotensi dalam masyarakat.

Langkah kedua, yaitu pengkajian TTG. Pengkajian merupakan suatu proses kegiatan dalam mengkaji atau menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG yang telah dilakukan sebelumnya. Pengkajian TTG ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi proposal dari kelompok masyarakat yang layak diberikan bantuan TTG sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pengkajian ini dilakukan melalui rapat dengan tim koordinasi dalam rangka memverifikasi kebutuhan kelompok masyarakat serta melakukan evaluasi terkait pengembangan inovasi usaha masyarakat pengguna TTG. Pelaksanaan pengkajian TTG ini sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan TTG.

Pengembangan TTG dilakukan melalui inovasi dan uji coba TTG yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan pengembangan TTG, ada beberapa kemungkinan potensi yang terkandung dalam masyarakat. Jadi, untuk melakukan pengembangan TTG perlu menggunakan difusi, yakni proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu dan untuk dapat melaksanakan konsep difusi inovasi diperlukan adanya kerjasama antar institusi terkait (*stake holder*).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai fasilitator mengadakan semacam rangkaian perlombaan TTG. Beberapa contoh alat-alat inovasi TTG, seperti becak penyapu sampah, alat perajang, dsb. Produk-produk alat TTG yang telah tercipta dari berbagai kelompok masyarakat kemudian diperkenalkan melalui pemasyarakatan TTG. Pemasyarakatan TTG bertujuan untuk lebih mengenalkan TTG secara lebih luas dengan melalui kegiatan-kegiatan, seperti gelar/pameran teknologi tepat guna, lokakarya, temu informasi teknologi tepat guna, pelatihan, pendampingan, komunikasi informasi dan edukasi, atau media massa. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mengikuti Gelar TTG Nasional rutin setahun sekali sebagai langkah strategis dalam menyebarluaskan informasi berbagai teknologi yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan sebagai forum untuk menggali pemikiran dalam rangka penyusunan kebijakan penerapan dan pengembangan TTG di masa mendatang. Peserta Gelar TTG Nasional berasal dari 33 Provinsi se- Indonesia.

Orientasi Posyantek dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas (*knowledge, skill* dan *attitude*) bagi pengurus Posyantek, khususnya dalam hal ini pengelolaan manajemen Posyantek. Namun, dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakatnya mengundang secara garis besar atau beberapa perwakilan dari Posyantek, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Selain memberikan pelatihan dan pemberian bantuan langsung, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok masyarakat. Pendampingan dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG. Bapermades melakukan pendampingan dengan berkoordinasi dengan lembaga pelayanan TTG. Lembaga pelayanan TTG terdiri atas Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) yang berkedudukan di Kecamatan. Posyantek merupakan embrio dari TTG. Posyantek memiliki empat fungsi, yaitu sebagai:

- a. *Chanelling*, artinya menghubungkan pembuat mesin dan konsumen (masyarakat).
- b. Perpustakaan, artinya menyediakan buku-buku dan cara-cara mengenai Teknologi Tepat Guna.
- c. Informasi, artinya memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan TTG kepada masyarakat.
- d. Bengkel, artinya menerima pemesanan dan memperbaiki alat-alat TTG.

Keberadaan Posyantek dinilai sangat penting dalam proses penerapan TTG dalam masyarakat. Setiap Kabupaten harus memiliki Posyantek di tingkat Kecamatannya, karena hal ini telah diinstruksikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat berwenang melaksanakan fungsi pengkoordinasian dan mensinkronkan berbagai program pemberdayaan secara *integrated* yakni mampu menciptakan sistem, mensinergikan dan menjembatani keseluruhan program pemberdayaan masyarakat.

Kendala - Kendala dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Kendala merupakan suatu hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan program pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Kendala tersebut dapat berasal dari individu/pegawai, internal organisasi maupun dari faktor di luar lingkungan organisasi. Hasil analisis taksonomi mengenai kendala pelaksanaan program pengelolaan TTG dapat berasal dari komunikasi, sumberdaya, sikap, struktur organisasi dan faktor lingkungan.

- Komunikasi
 - Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang optimal
 - Juknis hanya berupa dokumen yang sebagian besar membahas pemberian bantuan
 - Media informasi masih dengan sosialisasi kepada masyarakat,
 - Respon penerima informasi tergantung dari masing-masing individu
- Sumberdaya
 - Jumlah pengurus posyantek masih sangat terbatas mengakibatkan keterbatasan jangkauan pelaksanaan kegiatan TTG kepada masyarakat
 - Minimnya anggaran
 - Pelaksanaan kegiatan hanya berdasarkan kewenangan yang ada dalam peraturan
- Sikap
 - Pemahaman pelaksanaan program sangat tergantung pada masing-masing pegawai

- Harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan program terkadang tidak sama
- Masih terdapat harapan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Struktur Organisasi
 - Selama ini pelaksanaan kegiatan hanya berpedoman pada juknis dan belum terdapat SOP yang khusus mengatur program TTG secara menyeluruh
- Faktor Lingkungan
 - Sulit untuk mengubah persepsi yang ada di masyarakat terkait program TTG dipengaruhi dari pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat
 - Hanya kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang dapat memanfaatkan program TTG
 - Terkendala dalam mencari inovator pembuat alat TTG
 - Belum terdapat peraturan setingkat Peraturan Bupati di daerah yang mendukung pelaksanaan program TTG
 - Belum terdapat peraturan untuk membentuk lembaga khusus yang menangani teknologi tepat guna
 - Pelatihan orientasi posyantek yang secara bergilir dan hanya perwakilan
 - Beberapa Posyantek belum mampu menyediakan informasi

- o Produk usaha masyarakat masih dipasarkan secara lokal karena belum adanya kerjasama dengan pihak seperti koperasi dan sebagainya

Perlu adanya pembimbingan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat selaku fasilitator dalam pelaksanaan program pengelolaan TTG agar masyarakat mampu meningkatkan kualitasnya dalam mengembangkan usaha mereka melalui teknologi tepat guna

6.2. Arah dan Strategi Pengembangan

Pengembangan Posyantek difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;

Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat;

Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

6.2.1. Pemihakan Dan Pemberdayaan Masyarakat;

Posyantek sebagai lembaga yang bergerak dalam pelayanan dan informasi tentang TTG, mempunyai program untuk mensosialisasikan alat-alat TTG kepada masyarakat. Sosialisasi bukan hanya sebagai media pengenalan namun juga sebagai pemantik guna menumbuhkan minat dan ketertarikan mereka akan TTG.

Salah satu cara yang efektif agar masyarakat semakin mengenal TTG adalah dengan memberikan pelatihan, dan melakukan pembinaan serta pendampingan. Pelatihan, pembinaan dan pendampingan merupakan keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Posyantek. Kegiatan tersebut melibatkan sekelompok masyarakat yang sama-sama memiliki keinginan untuk mendapatkan pelatihan. Berkumpulnya masyarakat yang tertarik akan program Posyantek melakukan proses komunikasi kelompok, dimana mereka memiliki keinginan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan baru serta pelatihan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. *Training* atau pelatihan adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang anggota dalam melaksanakan pekerjaan tertentu (Kamil, 2012). Kegiatan pelatihan dilakukan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat tentang penggunaan alat tepat guna, kemudian pembinaan dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan usaha dengan menggunakan TTG dan pendampingan dilakukan dalam setiap usaha untuk mencapai keberhasilan usaha. Maka dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat pelaku usaha, mereka akan lebih mengenal TTG sehingga kegiatan produksi berjalan efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya.

Pendampingan merupakan bentuk program dari Posyantek dalam upaya meningkatkan produksi para pelaku usaha, serta menjadikan kegiatan usaha yang dilakukan menjadi lebih baik dengan adanya masukan-masukan yang diberikan oleh pengurus dari setiap proses produksi. Pendampingan merupakan salah satu strategi dalam menentukan keberhasilan program Posyantek. Pendamping hadir

sebagai agen pemberdaya yang membantu serta terlibat langsung dalam rangka mengoptimalkan kelompok usaha. Maka pemerintah memberikan kebijakan terhadap balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kemampuan pendamping kelompok usaha bersama melalui dunia pendidikan sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Nurhasanah, Kamil, & Saepudin, 2016). Kehadiran TTG terkadang membuat masyarakat masih belum mampu menggunakannya secara optimal, sehingga membutuhkan pendampingan dari para pengurus Posyantek.

Peran pengurus Posyantek terlihat sebagai fasilitator dalam upaya menyusun rencana- rencana pembangunan usaha, hal ini ditandai dengan pengurus Posyantek melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada dalam kelompok masyarakat. Menurut (Sianipar, Yudoko, Adhiutama, & Dowaki, 2013) ada tiga tahap dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan alat untuk masyarakat setempat, mengajari mereka bagaimana menggunakan dan memelihara dengan metode yang lebih baik, dan juga mengajarkan mereka bagaimana untuk membuatnya dengan dirinya sendiri, menyesuaikan fungsi berdasarkan kondisi yang diperlukan. Upaya ini akan mempertahankan pembangunan berkelanjutan, memberdayakan masyarakat setempat. Ketika orang luar meninggalkan mereka, masyarakat setempat akan mempertahankan pembangunan berkelanjutan oleh dirinya sendiri.

Pemberian informasi atau pengetahuan baru pada masyarakat, sekaligus adanya pelatihan, pembinaan dan pendampingan merupakan bentuk usaha dalam mencapai keberhasilan program PosyanteK dan usaha masyarakat. Sehingga dengan adanya pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik dan segala bentuk permasalahan yang ada dapat didiskusikan bersama untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Menurut (Suharto, 2009) memaparkan bahwa pendampingan adalah interaksi dinamis antara kelompok masyarakat untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti, merancang program perbaikan kehidupan ekonomi, mobilisasi sumberdaya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerja sama dengan pihak lain yang sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan kelompok yang dilakukan oleh PosyanteK dengan kelompok masyarakat menjadi alat yang dapat membantu PosyanteK dalam penerimaan ide-ide baru oleh masyarakat. Sekaligus menjadi ajang untuk berdiskusi, sehingga PosyanteK mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kelompok binaan. Diskusi merupakan proses komunikasi, dimana pengirim pesan dan penerima pesan saling berinteraksi dalam suatu waktu yang mana pada akhirnya dapat berbagi makna yang sama (Satriani, Muljono, & Lumintang, 2011). Dalam proses tersebut kelompok binaan menerima informasi baru yang dapat membantu mereka dalam penyelesaian masalah pengolahan pangan dan produksi. Pengumpulan informasi tersebut menurut Follet dalam (Littlejohn, 2009) merupakan salah satu langkah

kreatif dalam penyelesaian masalah organisasi atau komunitas, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari para ahli. Maka komunikasi kelompok yang telah dilakukan oleh Posyantek berampak positif terhadap kelompok binaan, karena mereka mau membuka diri dengan selalu menanyakan hal yang masih belum dipahami dalam sebuah diskusi.

6.2.2. Pemantapan Otonomi Dan Pendelegasian Wewenang Dalam Pengelolaan Pembangunan Yang Mengembangkan Peran Serta Masyarakat

Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga sosial atau pemerintah dapat berjalan baik, dengan adanya dukungan melalui komunikasi yang tepat untuk dapat mempengaruhi masyarakat. Komunikasi tersebut merupakan usaha untuk penerimaan program pembangunan yang telah dirancang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam penerimaan hal baru bagi masyarakat tersebut, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mereka dapat mengambil keputusan, menerima atau menolak hal baru tersebut. Hal baru disini dapat dikatakan sebuah inovasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Posyantek memberikan inovasi baru sebagai solusi kebutuhan masyarakat, yaitu dengan alat yang direkayasa dan dikenalkan pada masyarakat.

Inovasi TTG yang ditawarkan Posyantek pada masyarakat tidak selalu berbentuk alat, namun juga sebuah metode atau pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Agar tersampaikan solusi dan program yang dimiliki oleh Posyantek pada kelompok usaha kecil, maka pemberdaya melakukan pendekatan langsung.

Pendekatan secara interpersonal juga dilakukan oleh Posyantek agar inovasi tersebut dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat.

Pendekatan secara personal dengan mudah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan manfaat penggunaa TTG, dimana Posyantek dengan mudah mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk menerima inovasi baru. Seperti yang diungkapkan oleh (Satriani et al., 2011), bahwa melakukan pendekatan dengan komunikasi akan memberikan dampak lebih mendalam, karena dapat mengajak serta mempengaruhi sikap masyarakat untuk menerima informasi tersebut. Posyantek dengan melakukan pendekatan secara personal, memberikan dampak dapat meluasnya pemahaman akan TTG dengan cepat pada masyarakat. Sehingga masyarakat juga cepat menerima inovasi baru yang disampaikan oleh Posyantek.

Komunikasi menjadi kunci keberhasilan Posyantek dalam menyampaikan pesan pemberdayaan, sehingga masyarakat dapat menerima perubahan yang ditawarkan oleh posyantek. Perubahan merupakan hal baru yang masyarakat masih belum memahaminya, maka proses penyebaran atau pendefusian inovasi baru pada masyarakat sangat ditekankan. Hal tersebut dikarenakan difusi inovasi membutuhkan waktu dalam penerimaan oleh masyarakat yang diberdayakan.

Dalam proses tersebut masyarakat memiliki rentan waktu untuk dapat langsung menerima dan mengadaptasi secara langsung atau bahkan menolak. Maka penting bagi pemberdaya untuk memperhatikan kesesuaian pesan atau inovasi

yang ingin disampaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal tersebut posyantek telah mempetakan kepada kelompok-kelompok usaha kecil yang menjadi sasaran kegiatan posyantek. Mereka memberikan informasi dalam pengolahan makanan dengan bahan yang aman.

6.2.3. Penajaman Arah Perubahan Struktur Sosial Ekonomi, Budaya Dan Politik Yang Bersumber Pada Partisipasi Masyarakat.

Untuk bisa masuk ke dalam kelompok masyarakat, Posyantek membutuhkan orang yang berpengaruh di setiap daerah yang akan didatangi. Keikutsertaan kepala kelurahan ataupun orang yang dihormati di daerah tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan yang akan dilakukan Posyantek, karena mereka yang dapat menjembatani antara Posyantek dan masyarakat.

Pemilihan kepala kelurahan dan atau camat sebagai *opinion leaders* oleh Posyantek, karena dianggap sebagai tokoh yang memiliki *power* dalam mengumpulkan masyarakat. Dalam proses tersebut terlihat kepala desa berperan sebagai pendukung proses sosialisasi Posyantek mengenai TTG pada masyarakat. Kehadiran kepala desa dan tokoh masyarakat dapat memberikan kemudahan bagi Posyantek untuk tersampainya program pemberdayaan yang telah disusun untuk perbaikan kondisi masyarakat. Kepala desa ataupun tokoh masyarakat menjadi *opinion leader* yang membantu penyebaran informasi dari pihak pemberdaya kepada masyarakat, karena mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Sehingga bisa dikatakan *opinion leader* menjadi faktor penting yang membantu orang luar untuk pemberian informasi dan

pemberdayaan pada masyarakatnya (Manopo, 2013). Tokoh masyarakat menjadi media promosi bagi kelompok luar yang ingin masuk dalam lingkungan masyarakat, karena dari mereka keinginan dan tujuan pemberdaya dapat tersampaikan dengan cepat pada masyarakat (Satriani et al., 2011).

Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah informasi atau program baru yang bertujuan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Tujuan dari sosialisasi dalam pemberdayaan adalah untuk menciptakan komunikasi antara pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan, agar pemberdaya dengan mudah dapat memberikan informasi mengenai suatu informasi atau program, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan tujuan program pembangunan. Begitu juga yang dilakukan oleh Posyantek, untuk memberi informasi dan mengenalkan manfaat penggunaan TTG pada masyarakat maka mereka mensosialisasikan alat-alat TTG. Maka untuk mempermudah proses sosialisasi tersebut, terlebih dahulu Posyantek telah menentukan masyarakat sasarannya.

Sosialisasi pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program (Sankarto & Iskak, 2008). Posyantek sebagai agen pemberdayaan sekaligus sebagai fasilitator dijelaskan oleh (Fernandez, Vidueira, Diaz, & De, 2015), fasilitator merupakan point penting karena mereka akan terlibat langsung

dalam proses pemberdayaan kelompok-kelompok kecil, dengan melakukan pendekatan juga memberikan semangat bagi masyarakatnya.

Sosialisasi atau pemasyarakatan program adalah tahapan penting dalam program pengembangan masyarakat (Arbi, 2016). Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang TTG dan jasa layanannya, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat untuk melakukan perbaikan kondisi ekonomi mereka. Agar layanan Posyantek sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka mereka membangun dialog dengan masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dapat dilayani oleh pengurus Posyantek. Sebuah dialog yang terbentuk antara pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan merupakan salah satu konsep dari komunikasi partisipatif, yaitu adanya transaksi antara pengirim pesan dan penerima pada satu waktu yang sama, sehingga dapat berbagi pemahaman akan pesan yang disampaikan. Maka dengan adanya dialog yang terbangun, Posyantek mengetahui kondisi masyarakat dan apa saja yang dibutuhkan oleh kelompok usaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka.

Sasaran awal program kegiatan adalah masyarakat yang mempunyai usaha kecil, hal ini dilakukan agar masyarakat yang mempunyai usaha tersebut dapat bekerja lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan TTG, sehingga hasil produksi usaha akan semakin mengalami peningkatan. Penentuan kelompok usaha kecil merupakan usaha pemberdaya dalam pemanfaatan sumber daya dan juga keterampilan masyarakat, sehingga kegiatan yang dirancang akan lebih

terorganisir. Menjadikan kelompok usaha kecil sebagai sasaran kegiatan posyantek, agar dapat memperbaiki dengan cepat permasalahan ekonomi masyarakat di desa. Usaha kecil yang ada di desa diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, urbanisasi, serta pembangunan tidak merata. Sehingga kelompok usaha kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perbaikan pembangunan serta peningkatan produktivitas usaha (Gunawan, 2014).

Dalam proses sosialisasi tersebut Posyantek sebagai komunikator melakukan pendekatan pada masyarakat baik secara interpersonal maupun kelompok, agar dapat diterima kehadiranserta program yang akan dikenalkan pada masyarakat (Jones, 2013). Dalam proses tersebut membentuk sebuah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih, dimana mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah *feedback* dari komunikannya (Utomo, 2015).

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh Posyantek dengan pengenalan tentang Posyantek dan penjelasan mengenai TTG pada masyarakat, serta langsung memberikan contoh dalam penggunaannya dapat diterima dengan baik oleh kelompok masyarakat. Komunikasi yang terjadi dalam proses ini menunjukkan bahwa adanya dampak sosialisasi yang disampaikan oleh Posyantek cukup berhasil. Terlihat dari ketertarikan masyarakat dengan memberi pertanyaan atas informasi yang disampaikan oleh Posyantek. Sosialisasi dapat dikatakan berhasil dengan adanya *feedback* dari masyarakat, yang dianggap sebagai komunikasi timbal balik dan menandakan penerimaan program dari pemberdaya (Nurdin,

Cangara, & Sultan, 2014). Posyantek dalam penyampaian pesandikatakan berhasil, karena masyarakat sasaran bisa memberikan pertanyaan yang menandakan adanya pemahaman akan pesan yang telah disampaikan oleh Posyantek. Terlebih penyampaian pesan didukung dengan praktek yang menjadikan pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Untuk mendukung proses penyebaran pesan Posyantek menggunakan beberapa media agar dapat melakukan komunikasi dengan skala yang lebih luas yaitu, melalui jejaring sosial seperti facebook. Cara ini cukup efektif karena perkembangan saat ini menjadikan masyarakat lebih mengenal teknologi komunikasi yang ada.



BAB 8

INDIKASI KEGIATAN, SASARAN AKHIR DAN RENCANA AKSI

Untuk mendukung pengembangan Posyantek di Kota Surakarta, indikasi kegiatan, sasaran akhir dan rencana aksi. Adalah sebagai berikut:

Arah	Indikasi Kegiatan	Sasaran Akhir	Rencana Aksi
Pemihakan Dan Pemberdayaan Masyarakat; .	Integrasi Peran dan Hasil TTG Posyantek dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rumusan mekanisme Integrasi Peran Posyantek dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan sistem perencanaan reguler Kementerian/Lembaga dan/atau penyempurnaan Permendagri (Permendagri no. 54 tahun 2010, Permendagri no. 66 tahun 2007, Surat Mendagri no. 414.2/2207/PMD).	1. Pelaksanaan Workshop/ Lokakarya terkait dengan fokus tematik Mekanisme Integrasi Integrasi Peran dan Hasil TTG Posyantek dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2. Penyusunan mekenisme Integrasi Peran dan Hasil TTG Posyantek dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif
	Penyempurnaan Struktur dan Bentuk Pendampingan Posyantek Yang Disesuaikan Dengan Tematik Program	Tersedianya tenaga pendamping teknis pada masing-masing OPD yang mendukung posyantek	1. Kajian Permendagri tentang kader pemberdayaan masyarakat dan desa, 2. Penyusunan Pedoman Struktur dan Bentuk Pendampingan Pemberdayaan

Arah	Indikasi Kegiatan	Sasaran Akhir	Rencana Aksi
			Masyarakat.
Pemantapan Otonomi Dan Pendelegasian Wewenang Dalam Pengelolaan Pembangunan Yang Mengembangkan Peran Serta Masyarakat;	Perumusan Dasar Hukum bagi Eksistensi Posyantek dan Perannya dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Adanya payung hukum yang mampu mendorong eksistensi Posyantek dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Posyantek termasuk didalamnya dukungan sumberdaya dan sebagainya.
	Mendorong peningkatan peran swasta, industri, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan TTG	Posyantek menjadi inkubator pengembangan TTG yang dapat bersaing.	Peningkatan kerjasama Pemerintah dengan swasta dan Perguruan Tinggi baik melalui program CSR Perusahaan maupun Tri Darma Perguruan Tinggi dalam memajukan Posyantek
Modernisasi Melalui Penajaman Arah Perubahan Struktur Sosial Ekonomi (Termasuk Di Dalamnya Kesehatan), Budaya Dan Politik Yang Bersumber Pada Apatisipasi	Pengembangan Akses Teknologi Oleh Posyantek	Posyantek mampu melakukan inovasi pengembangan TTG secara lebih mandiri	1. Pelatihan dan Pemagangan 2. Peningkatan Kerjasama dengan Industri 3. Tersedianya workshop TTG yang dilengkapidengan sarana

Arah	Indikasi Kegiatan	Sasaran Akhir	Rencana Aksi
Masyarakat			produksi
	Peningkatan pemahaman tentang perubahan teknologi secara cepat	Posyantek mampu beradaptasi dengan kecepatan perubahan teknologi	1. Pengembangan keahlian IT 2. Peningkatan Kapasitas Manajemen teknologi Posyantek 3. Tersedianya pendamping teknologi yang mumpuni